

MEMBANGUN DEMOKRASI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PADA PEMILU 2019

13

Mohammad Mulyadi

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan. Tulisan ini membahas mengenai mengapa partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu kali ini mengalami peningkatan, berbeda dengan periode-periode sebelumnya, dan apa implikasinya bagi perwujudan demokrasi di Indonesia. Peran media sosial, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, Parpol, Caleg dan calon perwakilan daerah, serta daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019 merupakan faktor yang berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilu. DPR RI melalui Komisi II perlu memberi pengawasan kepada mitra kerjanya seperti KPU dan Bawaslu supaya bisa semakin aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan dalam memilih pada pemilu.

Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan bahwa partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sangat tinggi, yakni mencapai 80,90%. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sebesar 77,5% (kompas.id, 18 April 2019). Kondisi ini berbeda dengan periode-

periode sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu pertama pada periode Orde Lama tahun 1955 mencapai 91,1% dengan angka Golongan Putih (golput) hanya 8,6%. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu di era Orde Baru memang selalu tinggi, yakni di atas



Tabel 1. Tingkat Golput dalam Pemilu di Indonesia

No.1	Pemilu	Tingkat Partisipasi	Tingkat Golput
1	1955	91,1%	8,6%
2	1971	96,6%	3,4%
3	1977	96,5%	3,5%
4	1982	96,5%	3,5%
5	1987	96,4%	3,6%
6	1992	95,1%	4,92%
7	1997	93,6%	6,4%
8	1999	92,6%	7,3%
9	Pileg 2004	84,1%	15,9%
10	Pilpres 2005 - Putaran I	78,2%	21,18%
11	Pilpres 2005 - Putaran II	76,6%	23,4%
12	Pileg 2009	70,7%	29,3%
13	Pilpres 2009	71,7%	28,3%
14	Pileg 2014	75,2%	24,8%
15	Pilpres 2014	70,9%	29,1%

Sumber: merdeka.com

90%. Namun partisipasi yang tinggi ini belum cukup menggambarkan baiknya kualitas demokrasi, karena ketika periode Orde Baru, negara telah jauh terlibat dalam merekrut sistem Pemilu dan memobilisasi suara pada kelompok atau golongan tertentu. Setelah Orde Baru, tampak bahwa partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu mengalami penurunan. Angka golput dalam setiap pelaksanaan Pemilu terus meningkat.

Tulisan ini membahas mengenai mengapa partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu kali ini mengalami peningkatan, berbeda dengan

periode-periode sebelumnya, dan apa implikasinya bagi perwujudan demokrasi di Indonesia.

Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Politik

Salah satu dimensi kajian Sosiologi Politik adalah perkembangan masyarakat demokrasi, dalam hal ini melihat hubungan *state* dan *civil society* (Maliki, 2010). Sedangkan Budiardjo (2008) secara lebih luas melihat partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau

tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Salah satu kegiatannya adalah memberikan suara dalam pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu bisa tergambar dari banyak tidaknya masyarakat yang memilih golput. Golput dapat juga disebut sebagai perilaku apatis (*acuh*), tidak berpartisipasi dengan kegiatan memilih pemimpin atau wakil rakyat. Perilaku acuh tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap Pemilu ikut berpartisipasi memilih, namun merasa bahwa hasil Pemilu tidak memberikan banyak perbaikan nasib.

Di beberapa negara yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya seperti Amerika Serikat, golput juga hadir sebagai sebuah fenomena dalam demokrasi. Para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya disebut juga '*no voting decision*' (Mulyadi, 2018). Golput selalu ada pada setiap sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Semakin banyak pemilih golput menandakan semakin rendah partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perwujudan Demokrasi

Pemilu menjadi indikator suatu negara berdemokrasi atau tidak, sebab sebuah negara yang memberikan keluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perwakilannya di parlemen menandakan negara tersebut telah berupaya berdemokrasi. Oleh karena itu, demokrasi melalui kegiatan Pemilu mensyaratkan

warga untuk ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi.

Di beberapa negara, dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering menjadi topik utama diskusi sebuah negara demokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi dalam bentuk Pemilu yang akan mewakili mereka untuk menjalankan mandat rakyat dan menjadi perwakilan di parlemen.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019

Pada pemilu yang diselenggarakan 17 April 2019 lalu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sangat tinggi, yakni mencapai 80,90 %. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh KPU, yakni sebesar 77,5% (kompas.com, 18 April 2019). Meningkatnya partisipasi masyarakat juga terlihat dari konten dan wacana media, baik dalam media elektronik seperti televisi dan radio, media daring, maupun media sosial.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih tidak lepas dari beberapa faktor. **Pertama**, peran media sosial yang secara terus-menerus membentuk opini kepada masyarakat agar memberikan hak suaranya ketika pemilu. Data yang bersumber dari We Are Social dan Hootsuite (2018) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50% penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 49% persen populasi pengguna internet di Indonesia. Fakta dengan meningkatnya angka pengguna media sosial ini, pada akhirnya telah membawa persaingan baru bagi partai politik dan kandidat dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Chadwick (2006) menyebutkan media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada Partai Politik maupun kandidat yang didukungnya. Sejalan dengan Chadwick, Alami (2004)

mengungkapkan bahwa media sosial memungkinkan institusi politik, misalnya Parpol, dan pemilih untuk saling berinteraksi secara langsung. Bisa dikatakan, media sosial merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berkomunikasi secara interaktif dan mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi (Alami, 2014).

Kedua, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta Pemilu, Parpol, Caleg, dan calon perwakilan daerah. Kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, parpol, dan komponen penyelenggara pemilu. Hal ini penting sebagai upaya terus menerus dan berkelanjutan untuk membangun bangsa dengan menciptakan iklim demokrasi yang bersih, sehat dan cerdas sedari dini, guna mengetahui hak-hak dan kewajiban warga negara terutama dimulai dari kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Ketiga, daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019 terutama bagi kalangan milenial juga sangat menentukan dalam menaikkan grafik angka pemilih. Hal ini bisa dipahami karena polarisasi yang terbentuk oleh dua kubu selalu menampilkan kampanye program yang berbeda. Bagi kubu petahana apa yang sudah dilakukan sebelumnya adalah sebuah prestasi yang harus dilanjutkan, namun sebaliknya bagi kubu penantang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh

petahana tidak efektif dan efisien sehingga menawarkan program-program baru yang dapat diterima oleh masyarakat pemilih.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu 2019 menggambarkan demokrasi di Indonesia yang semakin baik. Meskipun secara teoritik pemberian suara dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi terendah dalam politik, namun pengaruh pemberian suara dalam pemilu melalui partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan, khususnya bagi tercapainya *output* pemilu yang berkualitas. Pemilu 2019 menunjukkan bahwa rakyat mampu menggunakan haknya untuk terlibat dalam keputusan-keputusan politik.

Penutup

Partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif. Namun pada pemilu kali ini partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu peran media sosial, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, parpol, caleg dan calon perwakilan daerah, serta daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019.

DPR RI melalui Komisi II perlu memberi pengawasan kepada mitra kerjanya seperti KPU dan Bawaslu supaya bisa semakin aktif

memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan dalam memilih pada pemilu. Hal ini dilakukan supaya penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat berjalan lebih baik demi perwujudan demokrasi.

Referensi

- Alami, Athiqah Nur. (2013). "Menakar Kekuatan Media Sosial Menjelang Pemilu 2014". *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 10, No. 1, hal. 85-100. Jakarta: LIPI.
- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- "Golput, Hak atau Tindak Pidana?", <https://www.kompasiana.com/myraivana/5c0180656ddcae06420c1be6/golput-hak-atau-tindak-pidana>, diakses 30 April 2019.
- "Ini Tingkat Partisipasi Pemilih dari Pemilu 1955-2014." <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, diakses 18 April 2019.
- Kusmayadi, Edi. (2015). *Dinamika Realitas Politik Lokal*. Yogyakarta: De Publish.
- Mulyadi, Mohammad. (2018). *Falsifikasi Demokrasi, Berpikir Ulang Demokrasi*. Jakarta: Obor.
- "Partisipasi Pemilu Serentak 2019 mencapai 80,90 Persen", <https://kompas.id/baca/utama/2019/04/18/partisipasi-pemilu-serentak-2019-capai-8090-persen/>, diakses 18 April 2019.

“Partisipasi Pemilih dalam Pemilu”, <http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/index.html>, diakses 30 April 2019.

“Pemilu Serentak, Antusiasme Pemilih, dan Kompleksitasnya”, <https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/19/04/2019/pemilu-serentak-antusiasme-pemilih-dan-kompleksitasnya/>, diakses 29 April 2019.

“Voter Turnout Trends Around The World”, Annual Results Report 2016. https://www.idea.int/reference_docs/annual-results-report-2016, diakses 29 April 2019.



Mohammad Mulyadi
mahammad.mulyadi@dpr.go.id

Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tahun 2008. Saat ini, ia menjadi Peneliti Bidang Kepakaran Sosiologi Politik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisannya dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 3) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 4) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Peneltian Sosial; 5) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 6) Desa, Dinamika Sosial Kehidupan di Desa.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.